

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH
(Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo)**



IAIN PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Oleh,

**EKA ASTRIA
NIM. 13.16.15.0112**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH
(Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo)**



IAIN PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Oleh,

**EKA ASTRIA
NIM. 13.16.15.0112**

Dibimbing oleh:

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H**
- 2. Burhan Rifuddin, SE.,M.M**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	iii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Pustaka.....	8
C. Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Sumber Data.....	24
D. Subjek Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	24
C. Sumber Data.....	24
D. Subjek Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27



ABSTRAK

Nama : Eka Astria
NIM : 13.16.15.0112
Konsentrasi : Perbankan Syariah
Judul Tesis : Implementasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Perbankan syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Palopo)

Kata Kunci : Tanggung jawab sosial, Bank Syariah Mandiri Palopo

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo dan mengetahui faktor yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial di Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan kualitatif atau naturalistik. Sumber data yaitu data primer bersumber dari manajer Bank Syariah Mandiri Palopo dan Staf Pengawai Bank Syariah Mandiri Palopo melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, display data, memverifikasi data, dan memberikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan analisis diperoleh bahwa (1) pelaksanaan tanggung jawab sosial di Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo berupa pendidikan dan pelatihan (dukungan penelitian, magang dan pelatihan). Dukungan dalam kegiatan pelayanan pada lembaga yang mengajukan proposal, majelis taklim untuk perkembangan dakwah dan dukungan tablik akbar, serta zakat). Mendukung kesejahteraan karyawan melalui pemberdayaan karyawan dan keluarganya dan kepuasan nasabah dengan informasi dan sosialisasi-sosialisasi produk terbaru serta pelayanan yang baik. Kegiatan tersebut bersumber dari zakat, infaq dan sedekah yang bersumber dari karyawan, nasabah, dana kegiatan dan dana sosial lainnya., (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial di Bank Palopo Cabang Palopo adalah bentuk pertanggung jawaban bank Mandiri Syariah terhadap Allah swt, *Stakeholders* (nasabah) karyawan dan masyarakat (3) Kendala yang dihadapi oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo pada Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah faktor budaya, dimana masih adanya anggapan bahwa pelaksanaan tanggungjawab sosial hanya sebatas kepatuhan saja dan upaya yang dilakukan Bank syariah Mandiri Cabang Palopo untuk mengatasi kendala itu dengan cara adanya pembuktian dengan transparan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Astria
NIM. : 13.16.15.0112
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 19 April 2017

Yang membuat pernyataan,

Eka Astria
NIM. 13.16.15.0112

PRAKATA

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ, وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ, وَعَلٰى اٰلِهِ
وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ, اَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang memberikan petunjuknya kepada penulis dalam proses menuntut ilmu dan menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini. salawat dan salam kepada rasulullah saw senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi ini berjudul “implementasi tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah (studi pada bank syariah mandiri cabang Palopo)”.

Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk melengkapi keseluruhan kegiatan perkuliahan dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis sebagai mahasiswa IAIN Palopo serta memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada program studi perbankan syariah di fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Palopo.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan kerjasamanya, terkhusus kedua orang tua saya Bapak Karyadi dan Ibu Nahari yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun material. Sungguh peneliti sadari tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulase, MM., selaku Dekan fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Dr. Takdir, SH.,M.H, Dr.Rahmawati.,M.Ag, Dr. Muhammad Tahmid Nur,M.Ag selaku wakil dekan I,II,III fakulttas Ekonomi dan bisnis Islam IAIN Palopo.
4. Zainuddin S, S,E. M.Ak selaku ketua program studi perbankan syariah.
5. Bapak Dr.Takdir , SH., M.H dan Bapak Burhan Rifuddin, SE., M.M selaku dosen pembimbing skripsi I dan dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis mulai awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Dr.Muammar Arafat Yusmad, SH, M.H dan Ilham, S.Ag, M.A selaku dosen penguji I dan dosen penguji II.
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan di IAIN Palopo yang dengan sabar mendidik dan membagi pengetahuan, pemahaman, motivasi dan pelayanan selama penulis melaksanakan studi.
8. Kepala perpustakaan dan jajarannya yang telah memberikan ruang dan pelayanan dalam membantu penulis untuk keperluan studi kepustakaan.
9. Ibu helmi Meylani Idrus selaku konsumen banking Relationship Manager dan Bapak Alimuddin selaku Pawning Officer di PT. Bank Syariah Mandiri cabang palopo yang telah memberikan informasi yang di butuhkan oleh peneliti hingga selesai menyusun skripsi.
10. Teman-teman FEBI 2013 dan teman kelasku Perbankan A dan semua pihak yang belum sempat penulis jelaskan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuannya, dukunganya dan doa'nya.

Akhirnya tidak ada kata yang lebih penting selain harapan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkhususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Aamin.

Palopo, 03 Mei 2017
Penulis,

Eka Astria

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

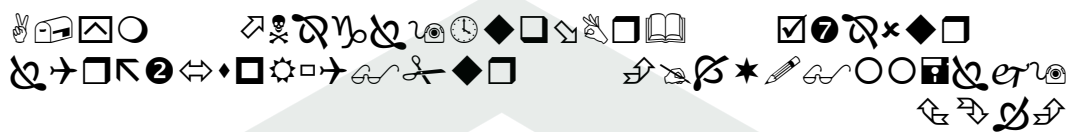
Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.¹ Di tanah air, Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya permintaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab sosial dan pengungkapannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan pernyataan umum yang menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan internal dan eksternal.

¹ Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 4.

² Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, h. 5.

Kegiatan bisnis termasuk bisnis perbankan tidak akan pernah terlepas dari ikatan akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah “konsep dimana nilai-nilai Al-Quran harus dijadikan prinsip dasar dalam aplikasi akuntansi”.³ CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur’an. Seperti firman Allah Q.S. adz-Dzariyat/ 51): 9:



Terjemahnya:

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁴

Islam sangat menganjurkan kedermawanan sosial kepada orang-orang yang memerlukan melalui pintu sedekah. Allah berfirman dalam Q.S. al-taghaabun/64: 16:



Terjemahnya:

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan

³ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat.Muhammad, 2005), h. 11.

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2005), h. 254.

Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.⁵

Ayat di atas menjelaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesama melalui sumbangan, segala bentuk kecongkakan dan kekikiran adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Ayat ini pula menyatakan bahwa setiap transaksi dalam Islam, baik tunai maupun kredit, harus dilakukan proses pencatatan, atau dengan kata lain akuntansi. Hal ini dimaksudkan agar penjual maupun pembeli lebih mudah dalam mempertanggungjawabkannya.

Alasan perusahaan khususnya dibidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggung jawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*. Sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial.

Tanggung jawab sosial merupakan praktik pelaporan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah.

Bentuk pertanggungjawaban sosial tersebut adalah diungkapkannya atau dibuatnya suatu laporan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada para *stakeholders* bahwa perusahaan memberi perhatian pada pengaruh sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan. Pengungkapan

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 521

ini bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pengaruhnya bagi masyarakat.⁶

Pemilihan bentuk tanggung jawab sosial disektor perbankan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor keuangan atau *financial* seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank. Bank dengan jumlah cabang yang lebih banyak dianggap mempunyai visibilitas tinggi antar pelanggan sehingga harus lebih banyak juga melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya.

Meutia menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Syariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam *syariah enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Palopo)”

⁶ Meutia, Inten, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2011), h. 11

⁷ Meutia, Inten, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, h. 11

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa atau pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Bagi kalangan akademisi atau peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

3. Bagi kalangan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial bagi bank Mandiri Syariah Cabang Palopo.

4. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang masalah yang diteliti.

E. Defenisi Operasional Konsep

1. Tanggung jawab sosial merupakan satu bentuk tindakan etis perusahaan/dunia bisnis dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas.

2. *Enterprise theory* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan

3. Perspektif syariah adalah bentuk pertanggungjawaban bagi umat Islam yang berbisnis termasuk bisnis perbankan tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika syariah, konsep dimana nilai-nilai Al-Quran harus dijadikan prinsip dasar dalam tanggung jawab sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dengan adanya penilitian, penelitian dapat membandingkan dengan penelitiannya. Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diah Febrianti dengan judul skripsi “*Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada PT. Bank X, Tbk)*” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya peranan penting antara penerapan *Good Corvorate Governance* dengan pelaksanaan praktik *Corporate Social Responsibility*, dimana dengan penerapan prinsip *Good Corvorate Governance* maka implementasinya terhadap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* menjadi terarah dan lebih terfokus terhadap program *Corporate Social Responsibility* yabg dibutuhkan oleh masyarakat luas lebih terstruktur dan mengalami perbaikan menjadi lebih baik dari tahun ketahun.¹

2. Aditya Prayanto Putra dengan judul skripsi “Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur)” hasil penelitian menunjukkan bahwa program kegiatan dan bina lingkungan dilaporkand alam posisi keuangan dan loporan

¹ Diah Febrianti, 2011. *Good Corvorate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada PT. Bank X, Tbk)*. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. Bogor, h. 1

kativitas yang terpisah dari laporan keuangan utama perseroan menggunakan dasar PSAK 45-pelaporan keuangan entitas nirlaba.²

Dari kedua penelitian terdahulu diatas, ada beberap aspek yang membedakan dengan penelitian sekarang, yaitu pembahasan terdahulu lebih spesifik pada penerapan pada *Good Corvorate Governance* dan perlakuan Akuntansi terhadap pengungkapan Pelaporan Pertanggungjawaban. Sedangkan penelitian sekarang mencoba menganalisis dari perspektif syariaah *enterprise theory* dalam pengungkapan laporan pertanggungjawaban.

B. Kajian Teori

1. Tanggung Jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

a. Sejarah Tanggung Jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Sejarah keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebenarnya telah ada sejalan dengan perkembangan aktivitas bisnis (perdagangan) itu sendiri, meskipun pada saat itu tidak terdapat konsep baku mengenai hal tersebut. Bahkan dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya.

Terjadinya industrialisasi menyebabkan perubahan besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak dari industrialisasi adalah pada abad ke-19, para pekerja mengalami eksploitasi secara sistemik dimana mereka memperoleh upah yang rendah, lingkungan kerja seadanya dan sangat tidak manusiawi, harus

²Aditya Prayanto Putra, 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur)*, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, h. 1

bekerja dengan disiplin militer, diberhentikan dan mengalami pengangguran. Para pemberi kerja sampai dengan tahun 1920-an berkeinginan untuk melupakan atau mengangkat eksploitasi tersebut dengan meningkatkan keadaan kerja yang lebih baik dan manusiawi.³

Perkembangan konsep tanggung jawab sosial perusahaan mengalami perkembangan dalam sejarah keberadaannya. Mengingat tanggung jawab sosial perusahaan muncul sebagai salah satu tuntutan dari *stakeholders*, sebagai akibat dari hak yang dimilikinya terganggu oleh eksistensi perusahaan. Sesuai dengan metaanalisis dan memperhitungkan karakter dekadanya perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu:

- 1) Perkembangan awal tanggung jawab sosial perusahaan tahun 1950 – 1960
- 2) Perkembangan pertengahan tahun 1970 – 1980
- 3) Perkembangan baru tahun 1990 – sekarang.⁴

Penggunaan istilah *Corporate Social Responsibilities (CSR)* dalam sejarah modern mulai dikenal sejak terbitnya buku Howard R. Bowen berjudul "*Social Responsibilities of the Businessmen*" pada era tahun 1950-an yang mengemukakan bahwa kewajiban perusahaan untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Sejak era 1950-an hingga 1960-an, perusahaannya menjalankan konsep tanggung jawab sosial dengan

³ Sutan Remy Sjahdeni, "*Corporate Responsibility*", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Vol. 26, No. 3 Tahun 2007), hal. 60.

⁴ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 48.

mengutamakan pada prinsip derma dan prinsip perwalian. Konsep tanggung jawab sosial dengan prinsip derma berasal dari kesadaran pribadi pemimpin perusahaan untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat. Sementara prinsip perwalian menyatakan perusahaan merupakan wali yang dipercaya dalam pengelolaan sumber daya, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan yang terkena dampak keputusan dan praktik operasi perusahaan.⁵

Perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan berlanjut ke era tahun 1970- 1980an yang mengedepankan arus utama pemikiran Archie B. Carroll yang menjelaskan tanggung jawab perusahaan ke dalam empat kategori, yaitu *economic responsibilities*, *ethical responsibilities*, *legal responsibilities*, dan *discretionary responsibilities*.⁶

Tahun 1990-an merupakan periode dimana praktik tanggung jawab sosial perusahaan diwarnai dengan beragam pendekatan, seperti pendekatan integral, pendekatan *stakeholders* maupun pendekatan *civil society*. Ragam pemberdayaan tersebut telah mempengaruhi praktik *community development* yang lebih manusiawi dengan bentuk pemberdayaan. Pada era 1990-an hingga saat ini perkembangan *CSR* berlandaskan pada *sustainable development* yang dipelopori *The World Commission on Environment and Development*. Salah satu terobosan besar dalam perkembangan *CSR* adalah apa yang dikemukakan dalam buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*, karangan John Elkington, yang memberikan terobosan besar dalam

⁵ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, hal 50.

⁶ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, hal 50

CSR. Hal ini sejalan dengan 3 (tiga) komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas *the World Commission on Environment and Development* dalam *Brundtland Report* (1987). Elkington sendiri mengemas CSR dalam tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, yaitu:

- 1) *Profit*, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang
- 2) *People*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.
- 3) *Planet*, perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlangsungan keragaman hayati.⁷

Konsep *triple bottom line* ini cukup banyak direspon oleh banyak kalangan karena mengedepankan strategi integral dengan memadukan antara *social motive* dan *economic motive*. Guna mencapai tujuan tersebut, perusahaan-perusahaan tidak mungkin dapat bekerja secara sendirian. Harus ada keterlibatan pihak pemerintah dan masyarakat secara langsung dalam tujuan pembangunan. Menurut Evans khususnya pemerintah (negara) merupakan suatu kelembagaan dan aktor sosial yang penting dalam tata kehidupan masyarakat modern. Tanpa pemerintah (negara) maka pasar sebagai kelembagaan kunci lain dalam kehidupan modern tidak akan mampu berfungsi dengan baik. Dalam hal ini negara dibutuhkan tidak hanya untuk menjaga keteraturan sosial, tetapi juga untuk memberikan landasan bagi mekanisme pasar agar dapat berjalan dengan baik.

⁷Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, hal 50

b. Pengertian Tanggung Jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung Jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) menurut istilah, dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan pengertian Tanggung Jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”⁸

CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan para pekerja, keluarga mereka dan komunitas lokal⁹. Sementara itu, menurut Suhandari M. Putri dalam

⁸ Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 27.

⁹ Mursitama, Tirta, dkk, *Corporate Social Responsibility di Indonesia (Teori dan Implementasi)*, (Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), 2011), h. 26.

buku yang ditulis oleh Untung, dalam bukunya “*Corporate Social Responsibility*” menyatakan bahwa:

“*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.”¹⁰

Dari beberapa pengertian CSR di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan satu bentuk tindakan etis perusahaan/dunia bisnis yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan alam sekitar perusahaan.

c. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip yang dikenal dengan triple bottom lines oleh Eklington yaitu:

1. Profit.

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendorong profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

¹⁰ Untung, Hendrik B. *Corporate Social Responsibility*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

2. People

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal.

3. Planet

Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Misalnya, penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, serta pengembangan pariwisata (*ekoturisme*).¹¹

d. Manfaat Pelaporan Tanggung Jawab Sosial

Manfaat pelaporan tanggung jawab sosial apabila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, yaitu dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, manfaat itu meliputi:

- 1) Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya

¹¹ Untung, Hendrik B. *Corporate Social responsibility*. h. 3

manusia. Untuk itu dibutuhkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab secara sosial.

2) Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan.

3) Menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik.

4) Kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah go public, menjadi lebih baik.¹²

Sementara itu manfaat eksternal yang dapat diperoleh perusahaan dari penerapan pelaporan tanggung jawab sosial sebagai berikut:

1) Penerapan tanggung jawab sosial akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggungjawaban secara sosial.

2) Pelaporan tanggung jawab sosial merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.

3) Melaksanakan pelaporan tanggung jawab sosial dan membuka kegiatan pelaporan tanggung jawab sosial secara public merupakan instrumen untuk

¹² Mursitama, Tirta, dkk, *Corporate Social Responsibility di Indonesia (Teori dan Implementasi)*, h. 27

komunikasi yang baik dengan khalayak.¹³

e. Dasar Hukum Tanggung jawab Sosial

Terdapat beberapa instrumen hukum di Indonesia yang mewajibkan perseroan terbatas untuk melakukan tanggung jawab sosial yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Mineba), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian disambung oleh Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap modal bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang

¹³Mursitama, Tirta, dkk, *Corporate Social Responsibility di Indonesia (Teori dan Implementasi)*, h. 30

pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan. Dalam Undang-undang ini muncul suatu bab yang mengartur tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, yaitu Bab V yang memuat hanya satu pasal yaitu pasal 74. Sekalipun tidak dengan jelas dikemukakan di dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang tersebut namun dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan pembuat undang-undang dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tidak lain apa yang dalam bahasa inggris disebut *social and environmental responsibility*, atau yang disebut juga *corporate social responsibility* yang pemahamannya sebelumnya. CSR yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 yang mencantumkan bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.¹⁴

Tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 74 ayat 1, 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang

¹⁴ Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Surakarta: 11 Maret University Press, 2007), hal. 52-53.

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵

f. Manfaat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Aktivitas yang berhubungan dengan program CSR mempunyai pengaruh positif pada kinerja ekonomi suatu bisnis dan tidak berbahaya bagi nilai-nilai *shareholders*. Menurut Nugroho manfaat yang akan diterima oleh perusahaan, masyarakat (termasuk buruh atau pekerjanya), lingkungan ataupun negara dari pelaksanaan CSR suatu perusahaan adalah :

1) Bagi Perusahaan, usahanya akan lebih lestari atau berkesinambungan (*sustainable*) karena pekerjanya sejahtera dan loyal bekerja pada perusahaan tersebut sehingga lebih produktif; bahan baku terjamin karena lingkungan terjaga; nama baik perusahaan dengan adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Pada akhirnya, laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan akan

¹⁵Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*,h. 54.

terjaga (*sustainable profitability*).

2) Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap kan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

3) Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan bahkan perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.

4) Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Negara juga akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.¹⁶

Sulit untuk menentukan *benefit* (keuntungan) perusahaan yang menerapkan CSR karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa bila perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR dengan baik akan mendapat kepastian *benefit*-nya. Untuk menentukan manfaat penerapan

¹⁶ Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility (CSR)*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), h. 27.

CSR, perlu membandingkannya dengan *driver*-nya agar lebih representatif.¹⁷

Manfaat pengungkapan laporan tanggung jawab sosial adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan, layak mendapatkan *social licence to operate* ketika mereka mendapatkan *benefit* dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Imbalan yang diberikan pada perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan serta peluang mendapatkan penghargaan, banyak *reward* ditawarkan bagai penggiat CSR, sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai kans yang cukup tinggi.

2. Syariah Enterprise Theory (SET)

a. Pengertian *Syariah Enterprise Theory* (SET)

Syariah Enterprise Theory merupakan enterprise theory yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Enterprise theory*, merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas. *Enterprise theory* mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (*stakeholders*), hal yang

¹⁷ Kartini, Dw, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2009), h. 41.

tidak mampu dilakukan oleh *proprietary theory* dan *entity theory*. Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders*.¹⁸

Konsep *enterprise theory* lebih menyerupai *stakeholders theory*, karena kedua teori ini mengakui keberadaan stakeholder sebagai pemegang kepentingan dan tanggung jawab perusahaan. Kedua konsep ini lebih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Selain itu, dalam teori tersebut mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, rahmatan lil alamin, dan masalahah), karena dalam konsep *enterprise theory* dan *stakeholders theory* dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal, melainkan bagi kepentingan semua stakeholder (manusia).

Menurut para ahli, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syari'ah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Namun demikian, *enterprise theory* perlu dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syari'ah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah *Syariah Enterprise Theory*

¹⁸ Triyuwono, Iwan. *Mengangkat "sing liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah*. (Simposium Nasional Akuntansi X Unhas, 26-28 Juli 2007), h. 4.

(SET).¹⁹

Syariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam.²⁰

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada "membangkitkan kesadaran ketuhanan" para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah.

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama

¹⁹ *Ibid*, h. 3

²⁰ *Ibid*, h.4-5

sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energy yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Syariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam *syariah enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. *Syariah enterprise theory* merupakan penyempurnaan dari tiga teori motivasi CSR, yaitu *agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholder theory*. *Agency theory* yang mana teori ini hanya mengedepankan kepentingan *principal* (pemegang saham). *Legitimacy theory* merupakan teori

yang berdasarkan nilai-nilai sosial atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *stakeholder theory* merupakan teori yang mengutamakan kepentingan stakeholders, akan tetapi stakeholders yang dimaksud dalam teori tersebut adalah manusia. Berbeda dengan *stakeholders* yang dimaksud dalam *syariah enterprise theory* yaitu Allah, manusia, dan alam.²¹

Secara implisit dapat kita pahami bahwa SET tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh *antroposentrisme*. Tapi sebaliknya, SET menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilNya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Allah memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya.

b. Konsep dan Karakteristik Pengungkapan CSR menurut *Syariah Enterprise Theory*

Syariah enterprise theory mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut, dijelaskan Meutia adalah:

²¹ Meutia, Inten, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2011), h. 49.

1) Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Allah dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Allah sebagai tujuan utama.

2) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh stakeholders (*direct*, *indirect*, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*.

3) Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah.

4) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spiritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*.

5) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.²²

Syariah enterprise theory mengajukan beberapa karakteristik terkait tema dan item yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah. Karakteristik-karakteristik ini, adalah:

1) Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertical terhadap Allah swt dan akuntabilitas horizontal terhadap *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam.

2) Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh stakeholders, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan.

²² Meutia, Inten, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2011), h. 239

3) Mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh.

3. Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh syariah *enterprise theory* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama oleh perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut, adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.²³

Akuntabilitas vertikal ini, ditujukan hanya kepada Allah. Beberapa contoh item yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah menurut syariah *enterprise theory* adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

Sedangkan akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam. Pihak-pihak yang disebut *direct stakeholders* menurut syariah *enterprise theory* adalah nasabah dan karyawan. Sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholders* menurut syariah *enterprise theory* adalah komunitas.

Beberapa item pengungkapan tanggung jawab sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah menurut syariah *enterprise theory* adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat dan qardhul hasan serta audit yang dilakukan terhadap laporan tersebut, informasi

²³ Meutia, Inten, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2011), h. 243

produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan dengan skema *Profit and Loss Sharing* (PLS), dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah dimasa mendatang. Sedangkan, beberapa item yang mengungkapkan adanya akuntabilitas horizontal kepada karyawan menurut syariah enterprise theory adalah adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam hal upah, training, dan kesempatan meningkatkan karir.

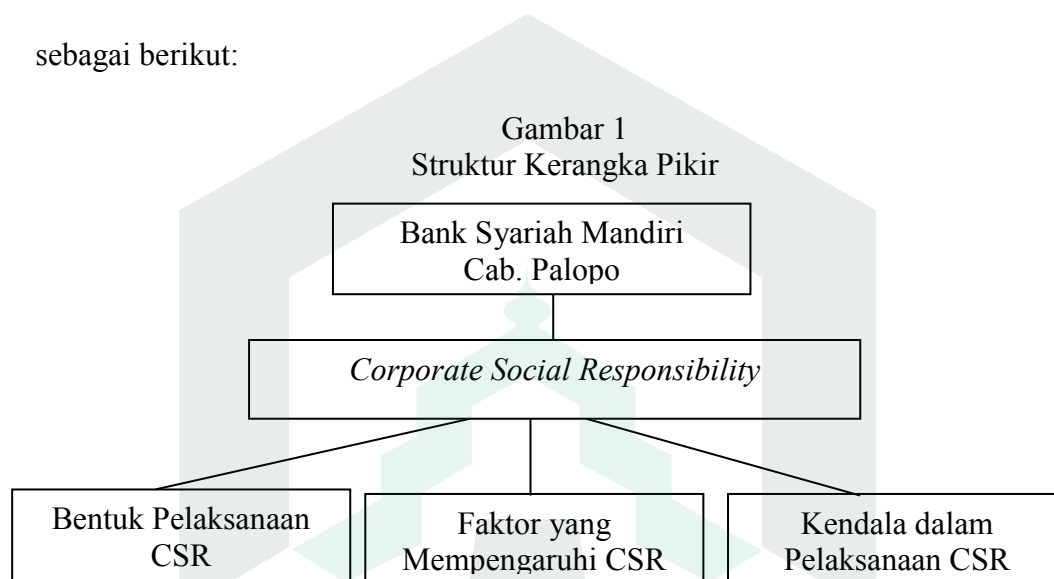
Beberapa item yang menunjukkan akuntabilitas kepada *indirect stakeholders*, dalam hal ini komunitas, berdasarkan *syariah enterprise theory*. Item tersebut antara lain adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan item pengungkapan yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada alam menurut *syariah enterprise theory* adalah adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan

pembiayaan tersebut, dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori mengenai pertanggungjawaban dan pembahasan mengenai bagaimana perbankan syariah mengungkapkan kegiatan-kegiatan pertanggungjawaban, peneliti merumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



. Sumber: Diolah Berdasarkan Kerangka Pikir

Pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan satu bentuk tindakan etis perusahaan/dunia bisnis yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan alam sekitar perusahaan. Alasan perusahaan khususnya dibidang perbankan melaksanakan tanggung jawab sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggung jawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*.

Lingkungan, alam, dan masyarakat setempat telah memberikan keuntungan kepada pengusaha. Oleh karenanya, sudah selayaknya, bahkan

wajib bagi pengusaha untuk memberikan sesuatu yang berguna bagi komunitas tempatnya berusaha. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor perbankan. Sektor perbankan diharapkan tidak hanya melaksanakan tugas-tugas utama perbankannya melainkan juga diminta untuk tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) sebagai wujud tanggung jawab sosial

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial di bank Mandiri Syariah karena bank Mandiri Syariah berdasar syariat islam, teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial, dalam hal ini bank syariah, adalah syariah *enterprise theory* (SET). Hal ini karena dalam syariah *enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Bank Syariah Mandiri senantiasa mengembangkan program dengan mempertimbangkan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan berlanjutan manfaat pelaksanaan program bagi tumbuh dan berkembangnya kemandirian komunitas sekitar. Pelaksanaan CSR di Bank Syariah Mandiri menimbulkan berbagai permasalahan baik itu dari masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang datang dari masyarakat, kadang kala masyarakat belum siap untuk diajak mengimplementasikan CSR terutama bila sifatnya partisipatif,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap dan menjelaskan pelaporan tanggung jawab sosial di Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo. Demikian pula dinamakan penelitian deskriptif, karena bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Selain itu, tujuan deskripsi adalah untuk membantu pembaca apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada diluar penelitian, dan seperti apa aktifitas yang terjadi di latar penelitian.¹ Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau naturalistik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Palopo. Alasan peneliti melakukan penelitian di Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo karena salah satu Bank yang menerapkan sistem syariah.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang

¹Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Press,2008), h. 175.

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan berupa lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu dan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data.²

1. Data primer

Data primer dalam skripsi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memahami masalah yang diteliti, semua data yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dan informasi yang diperoleh dilapangan menyangkut pelaporan pertanggungjawaban sosial milik PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo yang diperoleh situs resmi PT. Bank Mandiri Syariah dan hasil wawancara.

2. Data sekunder

Data skunder adalah data yang mendukung data primer. Data skunder diperoleh dari buku-buku, internet dan sumber lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber ini merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data, melainkan penelusuran kajian studi kepustakaan (*library research*).

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan laporan pertanggungjawaban sosial PT Bank Mandiri Syariah tahun 2015 sebagai objek penelitian. Bank ini dipilih karena merupakan salah satu Bank Umum Syariah yang telah lama beroperasi dan bukan merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Dengan asumsi, Bank Umum Syariah punya wewenang dan otorisasi berbeda dengan Unit Usaha Syariah bank konvensional yang statusnya tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terkait penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif, maka merujuk pada pendapat Lexi J. Moloeng³, metode yang digunakan sebagai cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penelaan document (dokumentasi) dengan uraian sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi diarahkan sebagai pengamat dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diselidiki.⁴ Pengamatan dilakukan dengan cara melihat dan peneliti mengamati sendiri terkait bentuk pelaporan di Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo

³ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 9.

⁴ Amirul Hadi dan Haryianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan untuk IAIN dan Ptain semua jurusan komponen MKK*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), h. 47.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara luas. Pertanyaan diarahkan pada pengungkapan kehidupan responden, persepsi, peranan, kegiatan, dan peristiwa-peristiwa yang dialami berkenaan dengan fokus yang diteliti.⁵

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bentuk pelaksanaan pelaporan tanggung jawab sosial pada Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo dan pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan syariah *enterprise theory*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai gambaran objek yang diteliti, disamping juga untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan, dan wawancara .

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisa data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil observasi, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti untuk dilaporkan. Peneliti memproses data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumen. Kemudian data dianalisa sedemikian rupa sehingga menjadi paparan data yang mudah difahami dan kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif.

⁵Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: Rosdakarya, 2009), h.112.

1. Reduksi Data

Data yang berasal dari hasil observasi, dan wawancara tentang bentuk pelaksanaan pelaporan tanggung jawab sosial pada Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo dan pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan syariah *enterprise theory*. Oleh karena itu untuk memperoleh informasi yang lengkap dari data-data tersebut dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam rangka menyajikan hasil reduksi data secara naratif, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan keputusan dalam pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis. Menganalisis kesesuaian pelaporan CSR perbankan syariah berdasarkan teori yang diajukan. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep dalam *Syariah Enterprise Theory* (SET)

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan memberi simpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup penarikan makna dan memberi penjelasan. Selanjutnya dilakukan verifikasi, yaitu menguji kebenaran, kekokohan dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.⁷ Sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah dilakukan, yaitu

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 16.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 19.

mempertimbangkan apa isi informasi, dan apa pula maksudnya. Kesimpulan akhir baru dapat diperoleh pada waktu data telah terkumpul dengan cukup, yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak terjadinya krisis moneter tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca bisnis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil keputusan/tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain, serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik

mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS). Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU RI No. 10 Tahun 1998, yang member peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, TPPS segera mempersiapkan system dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto SH No. 23 Tanggal 8 September 1999. Perubahan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999. BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Bank ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi

kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia.¹

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi Bank Syariah Mandiri

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha

b. Misi Bank Syariah Mandiri

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.²

3. Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo

Pemilihan bentuk tanggung jawab sosial di sektor perbankan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor keuangan atau *financial* seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank. Bank dengan jumlah cabang yang lebih

¹ Arsip Bank Mandiri Syariah Palopo “Observasi” tanggal 10 Maret 2017

² Arsip Bank Mandiri Syariah Palopo “Observasi” tanggal 10 Maret 2017

banyak dianggap mempunyai visibilitas tinggi antar pelanggan sehingga harus lebih banyak juga melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya.

Tanggung jawab social merupakan bagian dari eksistensi sebuah bank syariah utama, Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan prinsip pertumbuhan berkelanjutan. Bank Mandiri Syariah Indonesia menerapkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Arti dari bisnis berkelanjutan adalah bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan.

Tujuan Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo melaksanakan program tanggung jawab sosial yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan prinsip-prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang mengedepankan kepedulian pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial dan kemanusiaan, serta kesehatan, merupakan fokus utama dari wujud nyata pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Helmi sebagai berikut:

“Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang antara lain pendidikan dan pelatihan (dukungan penelitian, magang dan pelatihan. Dukungan dalam kegiatan pelayanan pada lembaga yang mengajukan proposal, majelis taklim untuk perkembangan dakwah dan dukungan tablik akbar, serta zakat). Kesejahteraan karyawan melalui pemberdayaan karyawan dan

keluarganya dan kepuasan nasabah dengan informasi dan sosialisasi-sosialisasi produk terbaru serta pelayanan yang baik.”³

Kemudian Almuddin mengungkap bahwa:

“Bank Syariah Mandiri menyalurkan dana zakat perusahaan (Bank), karyawan Bank, nasabah dan umum kepada yang berhak dengan bersinergi bersama LAZNAS BSM. Penyalurannya dilakukan melalui program yang berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat dengan melibatkan pegawai BSM dan, LAZNAS BSM dan warga sekitar”.⁴

a. Sumber Dana Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Helmi beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan tanggung jawab sosial yang biasa diadakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo bersumber dari zakat, infaq dan sedekah yang bersumber dari karyawan, nasabah, dana CSR dan 1% keuntungan dari perusahaan dan dana program lainnya”.⁵

Sebagai wujud komitmen BSM dalam menjadikan kegiatan CSR sebagai bagian strategi inti, perusahaan secara konsisten menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Pelaksanaan program CSR di BSM memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dan Dana Kebajikan, dengan uraian sebagai berikut:

³Helmi Meylani Idrus, Consumen Banking Realtionship Manajer “wawancara”, pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

⁴ Alimuddin, Pawning Officer “Wawancara” pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

⁵ Helmi Meylani Idrus, Consumen Banking Realtionship Manajer “wawancara”, pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

1) Dana Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS)

a) Dasar Hukum Pengelolaan Dana Zakat

LAZNAS BSM sebagai lembaga amil zakat yang ditunjuk dan diamanahi untuk mengelola dana zakat dari BSM mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun dasar hukum pengelolaan dana zakat sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- (4) Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Garis Besar Kebijakan Manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM).⁶
- (5) Standar *Operation Procedure* (SOP) sesuai dengan SK Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 09/001/ LAZNAS BSM.

b) Konsep Pengelolaan Dana Zakat

Penghimpunandan penyaluran zakat oleh LAZNAS BSM dalam kaitannya dengan BSM didasarkan atas Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 08 Oktober 2014: No BSM: 16/401A-PKS/DIR dan No.LAZNAS BSM: 13/029-PKS/LAZNAS. Lebih lanjut, konsep penyaluran zakat merujuk pada Fatwa MUI

⁶ Sumber Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

No. 15/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Dana Zakat) yang dinyatakan sebagai Zakat Muqayyadah (peruntukannya telah ditentukan oleh Muzakki) dengan tetap mengacu pada ashnaf zakat.

Helmi menambahkan bahwa:

“Selain bersumber dari zakat, infaq dan sedekah yang bersumber dari karyawan, nasabah, dana CSR juga bersumber 1% keuntungan dari perusahaan dan dana program lainnya”⁷

Dalam hal penghimpunan dana, secara periodik BSM menyalurkan dana Zakat (dari keuntungan perusahaan, nasabah, pegawai), dana Infaq (sumbangan sukarela dari nasabah, pegawai dan masyarakat) dan dana Program (dari pendapatan Non Halal BSM) melalui LAZNAS.

Tabel 4.2
Tabel Konsep Pendistribusian Zakat

No	Ashnaf	Metode Penilaian / Kriteria	Penerima Manfaat
1	Fakir	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan, Peninjauan ke lokasi, Penghasilan dibawah UMR.	Perorangan, Panti Asuhan, Pesantren (yang menampung fakir), Yayasan yang membina fakir dan miskin
2	Miskin		
3	Amil	SK Pengangkatan Pegawai, Surat Kontrak Kerja.	Pegawai LAZNAS BSM.
4	Mualaf	Surat Keterangan masuk Islam dari masjid.	Orang yang baru masuk islam.
5	Gharimin	Surat Keterangan Hutang.	Orang yang terlibat hutang untuk kebutuhan pokok.
6	Fisabilillah	1. Surat keterangan aktif dalam kegiatan keislaman. 2. Susunan kepengurusan DKM/Takmir Masjid (untuk pembangunan masjid/ musholla).	Perorangan (Da'i, Guru Agama), Masjid/ Musholla yang berada di lingkungan menengah kebawah
7	Ibnu Sabil	Surat keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat keterangan domisili	Orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan atau kena musiba

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

⁷ Helmi Meylani Idrus, *Consumen Banking Relationship Manajer “wawancara”*, pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

c) Penyaluran Dana Zakat

Dana Zakat bersumber dari zakat perusahaan (BSM), zakat dari nasabah dan umum, serta zakat pegawai Bank. Pada tahun 2015, BSM telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp31,28 miliar, sedangkan penyaluran zakat pada tahun 2014 sebesar Rp50,79 miliar melalui LAZNAS BSM.

Tabel 4.3
Penyaluran dana zakat (dalam Juta Rupiah) (dalam Juta Rupiah)

Penyaluran Dana Zakat	2014	2015
Saldo awal dana zakat	55.406,38	20.172,59
Dana zakat dari Bank	15.560,23	22.850,96
Keuntungan selisih kurs - bersih	0,07	1,39
Jumlah dana zakat	70.966,68	43.024,94
Penyaluran dana zakat	50.794,08	31.284,75
Saldo akhir dana zakat	20.172,59	11.740,18

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

Adapun Penggunaan dana zakat dari BSM melalui LAZNAS BSM disalurkan dalam bentuk 3 (tiga) program utama yaitu: program Mitra Umat, program Didik Umat dan program Simpati Umat. Pada tahun 2015, dana zakat yang telah disalurkan melalui LAZNAS BSM mencapai Rp19,20 miliar sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penyaluran Dana Zakat Korporat Bersama LAZNAS BSM 2015 (dalam Rp Juta)

No	Program	Zakat
1	Mitra Umat	4.068,03
2	Didik Umat	7.578,93
3	Simpati Umat	5.104,63
4	Beli Aset Kelolaan (tanah)	2.100,00
5	Porsi Amil	351,90
Total		19.203,50

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

Tabel 4.5
Tabel Penyaluran Dana Zakat 2015 Berdasarkan Asnaf (dalam Rp Juta)

No	Aznaf	Jumlah
1	Fakir	418,69
2	Miskin	13.426,58
3	Gharimin	81,70
4	Muallaf	0,00
5	Ibnu sabil	0,00
6	Riqob	0,00
7	Fii sabilillah	2.824,63
8	Amil	351,90
9	Beli aset kelolaan (tanah)	2.100,00
Total		19.203,50

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

Sedangkan berdasarkan penerima zakat, melalui program Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat, BSM dan LAZNAS BSM telah menyalurkan dana zakat sesuai dengan 8 (delapan) golongan aznaf penerima zakat. Pada tahun 2015, jumlah penerima zakat secara perorangan mencapai 14.319 orang dan secara kelembagaan mencapai 403 lembaga.

Tabel 4.6
Penerimaan Manfaat Dana Zakat 2015 (dalam Rp Juta)

Program	Penerimaan Manfaat	
	Perorangan	Lembaga
Mitra Umat	2.844	152
Didik Ummat	5.763	104
Simpati Ummat	5.711	147
Total	14.219	403

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

2) Dana Kebajikan

Dana Kebajikan bersumber dari Denda, Pendapatan Non Halal dan Dana Sosial lainnya. Penerimaan Dana Kebajikan per 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp73,74 miliar, meningkat dari periode sebelumnya sebesar Rp35,35 miliar. Dana kebajikan tersebut telah disalurkan melalui LAZNAS BSM pada tahun 2015 sebesar Rp5,54 miliar. Jenis kegiatan yang telah mendapat penyaluran Dana Kebajikan meliputi: pembangunan/renovasi sarana dan prasarana umum meliputi sekolah-sekolah, bantuan korban bencana alam, bantuan kesehatan, pembagian bukubuku dan komputer untuk sekolah-sekolah dan lain-lain

Tabel 4.7
Sumber Dana Kebajikan (dalam Juta Rupiah)

Sumber Dana	2014	2015
Denda	30.289,56	73.106,99
Penerimaan non-halal	441,57	427,35
Dana sosial lainnya	4.624,15	203,81
Jumlah sumber dana kebajikan	35.355,27	73.738,14

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

Penggunaan dana tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Penggunaan dana kebajikan (dalam Juta Rupiah)

Sumber Dana	2014	2015
Saldo awal dana kebajikan	31.009,35	64.112,88
Dana kebajikan dari BSM	35.355,27	73.738,14
Keuntungan selisih kurs	8,42	175,05
Jumlah dana kebajikan	66.373,04	138.026,07
Penggunaan dana kebajikan	2.260,16	5.540,16
Saldo akhir dana kebajikan	64.112,88	132.485,91

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

Program Penyaluran dana kebajikan berdasarkan pada 3 pilar antara lain:

- a) Spiritualitas (*Character Building*) meliputi bantuan mushalla/masjid dan fasilitas pendukung, bantuan kegiatan dakwah dan keagamaan
- b) Nasionalisme (*National Contribution*) meliputi beasiswa untuk anak kurang mampu, bantuan pembangunan sekolah/pesantren dan bantuan kebencanaan

- c) Kesejahteraan (*Economic Empowerment*) meliputi BSM-isasi kawasan kuliner, bantuan pelatihan dan modal kerja dan bantuan pemberdayaan ekonomi
- b. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terkait Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

- 1) Kegiatan CSR bersama Laznas BSM

Penghimpunandan penyaluran zakat oleh LAZNAS BSM dalam kaitannya dengan BSM didasarkan atas Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 08 Oktober 2014: No BSM: 16/401A-PKS/DIR dan No.LAZNAS BSM: 13/029-PKS/LAZNAS. Lebih lanjut, konsep penyaluran zakat merujuk pada Fatwa MUI No. 15/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Dana Zakat yang dinyatakan sebagai Zakat Muqayyadah (peruntukannya telah ditentukan oleh Muzakki) dengan tetap mengacu pada ashnaf zakat.

Pelaksanaan program CSR pengembangan sosial kemasyarakatan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) BSM dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM No. 12/410-PKS/DIR; No. 09/001/LAZBSM/DIR tanggal 12 November 2010 tentang Penyaluran Zakat dan Dana Program.

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bidang pengembangan sosial dan kemitraan bersinergi dengan LAZNAS BSM dilaksanakan dalam program Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat. Selama tahun 2015, BSM bekerjasama dengan LAZNAS BSM menyelenggarakan berbagai kegiatan CSR

dalam berbagai bentuk kegiatan dengan jumlah penyaluran dana 2015 sebanyak Rp19.204 juta.⁸

BSM beserta LAZNAS BSM telah melakukan penyaluran melalui program yang berdaya guna dan bermanfaat yakni Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat kepada 21.524 orang (mustahikin), meningkat dari periode sebelumnya, tahun 2014 sejumlah 14.582 orang (mustahikin).

Helmi mengatakan bahwa:

“Seluruh dana yang diterima Baitulmaal Mandiri Syariah (BMM) telah disalurkan kepada masyarakat melalui program-program yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya”.⁹

Adapun kegiatan CSR melalui kerjasama dengan LAZNAS BSM yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain:

a) Mitra Umat

(1) *Micro Entrepreneurship*

Merupakan program bantuan dana modal usaha bergulir untuk memulai dan mengembangkan kewirausahaan mustahik.

(2) *The Young Muzakki*

Merupakan program pelatihan dan pembekalan keterampilan hidup dan modal usaha kecil dalam bentuk kelompok.

⁸ Laporan Tahunan BSM Tahun 2015/2016

⁹ Helmi Meylani Idrus, *Consumer Banking Relationship Manager “wawancara”*, pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

(3) Kampung Berdaya

Merupakan sarana pemberdayaan potensi masyarakat berbasis kampung tempat tinggal dan komunitas (pesantren dan majelis taklim) dengan memberikan bantuan bibit tanaman, kandang, hewan ternak.

(4) Didik Umat

Memberikan bantuan pendidikan (beasiswa) kepada mereka yang membutuhkan dan mengupayakan tetap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Bantuan Juga termasuk sarana dan prasarana belajar.

Penyataan diatas diperkuat oleh hasil wawancara dengan Alimuddin yang mengatakan bahwa:

“Salah satu wujud kepedulian lembaga terhadap pemerataan pendidikan anak bangsa tercermin dari program santunan pendidikan berupa pemberian beasiswa dan pembinaan kepada anak yatim (piatu) dan miskin berprestasi”.¹⁰

(5) Simpati Umat

(1) Kesehatan

Berupa bantuan kepada pihak yg membutuhkan dibidang kesehatan termasuk sarana dan prasarananya.

(2) Kebencanaan dan lingkungan hidup

Bantuan untuk mengantisipasi kondisi darurat serta aktif mengurangi dampak akibat terjadinya bencana sosial. Aktif ikut memperbaiki atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara luas.

¹⁰Alimuddin, Pawning Officer “*Wawancara*” pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

2) Pengembangan Ekonomi Ummat

Pelaksanaan CSR bidang pengembangan ekonomi umat bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Program CSR bidang ini diwujudkan dalam pemberian bantuan permodalan, sarana kerja dan sebagainya.

Tabel 4.9
Pemberdayaan ekonomi Masyarakat

No	Kegiatan	Wilayah	Jumlah Penerima		Nominal
			Orang	Lembaga	
1	Kemitraan Usaha Binaan (Bergulir)	Jabodetabek	129	2	912.000.000
2	Bantuan modal kelompok usaha	Seluruh Indonesia	10	6	150.000.000
3	Bantuan modal perorangan	Seluruh Indonesia	856	1	1.918.449.547
4	Bantuan kegiatan pendampingan dan pelatihan nasabah warung mikro	Seluruh Indonesia	155		54.484.060
5	Bantuan pelatihan kewirausahaan	Seluruh Indonesia	50		14.033.400
6	Bantuan dana peternakan	Seluruh Indonesia	128	19	527.322.711
7	Bantuan dana tanaman produktif	Seluruh Indonesia		13	167.563.625
8	Pelatihan Keterampilan Usia Produktif	Seluruh Indonesia	245		148.444.442
9	Produk Kerajinan	Bayolali		1	122.121.000
Jumlah			573	42	4.014.418.785

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

3) Program Pendidikan dan Pelatihan

Program CSR BSM di bidang pengembangan pendidikan selama tahun 2015 telah disalurkan kepada 9.975 orang, meningkat dibanding realisasi tahun 2014 sebanyak 6.932 orang. Program difokuskan pada peningkatan kualitas

pendidikan, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu mulai pelajar Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh baik di lingkungan Kantor Pusat BSM di Jakarta maupun kantor cabang di seluruh pelosok negeri.

Tabel 4.10
Program Pendidikan dan Pelatihan

No	Kegiatan	Wilayah	Jumlah penerima		
			Individu	Lembaga	
				Sekolah/Universitas	Yayasan
1	Bantuan Beasiswa Mahasiswa	Indonesia	467	20	0
2	Bantuan Beasiswa SD, SMP dan SMA	Indonesia	8.889	60	0
3	Indonesia	Indonesia	360	26	0
4	Pelatihan	Indonesia	250	0	0
Total			9.975	106	0

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

Sedangkan program CSR BSM dalam bidang perbaikan sarana dan prasarana pendidikan selama tahun 2015/2016 mencapai sebesar Rp766,85 juta, dibanding realisasi tahun 2014/2015 sebesar Rp1,24 miliar. Jumlah total penerima bantuan perbaikan sarana pendidikan tahun 2015/2016 mencapai 16 penerima.

4) Program Sosial Kemasyarakatan

Program CSR BSM di bidang sosial/budaya selama tahun 2015/2016 menggunakan dana sebesar Rp1,99 miliar meningkat dibanding realisasi tahun 2014 sebesar Rp436,42 juta. Program CSR untuk bidang social/budaya diwujudkan dalam bentuk santunan dhuafa, santunan Ramadhan, bantuan korban

bencana alam, bantuan pembangunan dan renovasi masjid dan madrasah, dan program-program lainnya.

Tabel 4.11
Tabel Bantuan Program Sosial Kemasyarakatan melalui Lembaga 2015/2016
(dalam Rupiah)

No	KC/KCP	Lokasi	Nilai Bantuan
1	PWF	Bantuan pangan untuk muslim Palestina	50.000.000,00
2	PWF	Bantuan pangan untuk muslim Palestina PWF	50.000.000,00
3	KC Aceh	Bantuan nelayan muslim Rohingya Aneuk Nanggroe Chari	10.000.000,00
4	KC Bandung	Ranjang pasien kelas 3 RSI KSWI Jabar	50.000.000,00
5	KC Bima	Pengecetan mobil ambulance	20.000.000,00
6	KC Rengat	Pendukung alat medis RSUD Indrasari Rengat	26.031.000,00
7	PWF	Bantuan untuk rakyat Palestina	24.999.894,50
8	KC Kotamobagu	Bantuan kendaraan roda 2 tuk dokter RSUD Puri Husada	14.122.000,00
9	KC Luwuk	Bantuan ambulance Pemda Banggai	294.600.000,00
Jumlah			539.752.894,50

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

Tabel 4.12
Tabel Bantuan Program Sosial Kemasyarakatan Kepada Perorangan 2015/2016
(dalam Rupiah)

No	KC/KCP	Lokasi	Nilai Bantuan
1	KC Polewali	Bantuan Bedah rumah a.n Ali	10.000.000
2	KC Aceh	Bantuan Bedah rumah a.n Irwan & Mariyani	30.000.000
3	KC Pandegelang	Bantuan Bedah rumah a.n ref	15.000.000
4	KC Pandegelang	Bantuan bedah rumah an Rokoyah	15.000.000
5	KC Pandegelang	Bantuan Bedah rumah a.n M. Alif Bunyani	15.000.000
6	KC Ponerogo	Bantuan Bedah rumah Tahap. 3	50.000.000
7	KC Kadongora	Bantuan Bedah rumah a.n Enggen	15.000.000
8	KC Bukit Tinggi	Bantuan Bedah rumah a.n Zulhelmi	10.000.000

9	KC Cikini	Bantuan Bedah rumah a.n Simah	15.000.000
10	KC Cikini	Bantuan Bedah rumah a.n Eman Sulaiman	15.000.000
11	KC Citereup	Bantuan Bedah rumah	50.000.000
12	KCP Citereup tahap I	Bantuan bedah rumah tahap I	50.000.000
13	KCP Citereup tahap II	Bantuan bedah rumah tahap II	50.000.000
14	KC Bekasi	Bantuan Bedah rumah a.n Sungkono, Bekasi	15.000.000
15	KC Bekasi	Bantuan Bedah rumah a.n Ood subandi	45.000.000
16	KC Bekasi	Bantuan Bedah rumah a.n Sanim ref KC Bekasi	45.000.000
17	KC Bukit Tinggi	Bantuan Bedah rumah korban a.n Nasir	5.000.000
18	KC P Indah	Bantuan Bedah rumah a.n kristian	15.000.000
19	KC Pandegelang	Bantuan Bedah rumah a.n Tajudin	15.000.000
20	KC Lubuk Sikaping	Bantuan Bedah rumah a.n Hendra	20.000.000
Jumlah			500.000.000

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

c. Pelaksanaan CSR Terkait Tanggung Jawab Terhadap Konsumen

1) Kebijakan CSR terhadap Konsumen

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, BSM senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. BSM tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (*product responsibility*). Merespon hal tersebut, Kebijakan yang diambil oleh BSM berupa Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah. Bentuk jaminan perlindungan simpanan nasabah yang telah dilakukan oleh Bank adalah dengan mendaftarkan sebagai peserta Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan pembentukan cadangan kerugian pembiayaan aktiva produktif.

2) Program CSR terkait Keselamatan Konsumen/Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Kepercayaan tersebut lahir apabila ada kepastian hukum dalam pengaturan, pengawasan bank, dan penjaminan simpanan nasabah Bank.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), BSM memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Sebagai bentuk kepatuhan atas diterbitkannya Undang-Undang tersebut, pada tahun yang sama BSM telah mendaftarkan diri sebagai bank peserta LPS. Selanjutnya untuk mendukung jaminan keselamatan simpanan nasabah (keselamatan konsumen Bank), BSM telah membentuk cadangan kerugian atas pembiayaan yang telah disalurkan.

3) Pusat Informasi Produk dan Sarana Pengaduan Konsumen (*Customer Care*)

BSM telah membentuk pusat informasi produk dan layanan serta sekaligus sebagai sarana pengaduan bagi konsumen atas layanan perbankan. Kemudahan akses informasi dan jaringan layanan perbankan telah disediakan oleh Bank.

Melalui pusat layanan informasi produk dan pengaduan ini, BSM memberikan respon yang cepat atas permintaan informasi produk dan layanan perbankan serta pengaduan yang masuk. Lebih lanjut, Bank dapat memberikan penyelesaian atas aduan secara lebih cepat dan bijak.

4) Penanggulangan Pengaduan Konsumen/ Nasabah

Melalui pusat pengaduan, Bank memberikan respon yang cepat atas pengaduan yang masuk dan penyelesaian secara bijak. BSM telah membentuk bagian *Service Quality Management & Customer Care* (SQM & CC) yang berada di bawah *Culture & Customer Care Group* yang fokus untuk monitoring pengaduan nasabah.

Pengaduan nasabah dapat disampaikan melalui seluruh cabang dengan melakukan pengisian formulir permintaan/pengaduan nasabah yang diatur tersendiri dalam peraturan internal Bank atau nasabah dapat juga menyampaikan pengaduannya melalui BSM Call.

4. Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo.

1. Akuntabilitas vertikal: Allah swt

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Alimuddin mengatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban kepada Tuhan yang dapat dianggap sebagai upaya bank untuk memenuhi prinsip syariah antara lain dapat dilihat melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan merupakan salah satu kepatuhan bank terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional”.¹¹

Meskipun sebenarnya opini ini lebih pada menjelaskan kepatuhan bank terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol untuk memonitor kinerja bank Islam yang berkaitan dengan isu kepatuhan pada syariah. Selain itu Dewan Pengawas

¹¹ Alimuddin, Pawning Officer “*Wawancara*” pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

Syariah (DPS) juga dimaksudkan untuk memastikan semua kontrak, prosedur dan transaksi yang dilakukan oleh bank Islam adalah sesuai dengan aturan Islam.

Laporan Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini memberikan jaminan bahwa operasional dan produk bank syariah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia, dan Opini DPS. Berdasarkan pernyataan Dewan Pengawas Syariah Bank (DPS Bank) menyatakan bahwa berdasarkan pengawasannya secara umum aspek operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-181/DSN- MUI/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 dalam rangka penawaran umum sukuk dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/I/IX/202 tentang obligasi syariah mudharabah.

2. Akuntabilitas horizontal: *Direct Stakeholder*

a. Akuntabilitas Horizontal terhadap Nasabah

Akuntabilitas merupakan salah satu konsep penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban terhadap *Stakeholders* (nasabah). Nasabah termasuk dalam kelompok *Direct Stakeholder* yaitu pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan.

Dalam meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo telah mengungkapkan beberapa item yang berkaitan dengan nasabah seperti yaitu:

a) Kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Mandiri Syariah Indonesia (BMI) telah memiliki pengalaman yang luas dibidang syariah dan telah sekian lama menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa bank/lembaga keuangan non bank.

b) Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo aktif mengadakan serangkaian rapat baik dengan Direksi maupun pejabat/staf senior Bank Mandiri Syariah untuk membahas perkembangan produk dan jasa serta aktivitas operasional Bank Mandiri Syariah dari aspek kesesuaian syariah.

c) Renumerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 26 Mei 2011 yang dinotariskan oleh Notaris Arry Supratno, SH dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan No. 259, ditetapkan bahwa tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih Perseroan setelah dipotong Pajak dan Zakat Perseroan per 31 Desember 2010.¹²

d) Adanya transaksi/sumber pendapatan/biaya yang tidak sesuai syariah.

Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan Baitulmaal Mandiri Syariah (BMM) bersumber dari dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Bank Mandiri Syariah, karyawan dan nasabah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR),

¹² Alimuddin, Pawning Officer "Wawancara" pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

dan dana sosial lainnya, serta dana non-halal yang diterima Bank Mandiri Syariah seperti pendapatan yang bersumber dari penempatan dana pada bank konvensional.¹³

e) Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana Zakat

Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan Baitulmaal Mandiri Syariah (BMM) bersumber dari dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Bank Mandiri Syariah, karyawan dan nasabah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan dana sosial lainnya, serta dana non-halal yang diterima Bank Mandiri Syariah seperti pendapatan yang bersumber dari penempatan dana pada bank konvensional. Tidak hanya bersumber dari Bank Mandiri Syariah, Baitulmaal Mandiri Syariah (BMM) juga telah menerima dana zakat, infaq, sedekah (ZIS), wakaf, kemandirian, dan dana non-ZIS, serta dana sosial lainnya dari masyarakat dan beberapa lembaga lainnya baik didalam negeri maupun luar negeri.¹⁴

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan meningkatkan respon terhadap keinginan masyarakat untuk memilih perusahaan tersebut sehingga dapat menguntungkan perusahaan. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap nasabah adalah mengurangi citra perusahaan dimata para nasabah sehingga nasabah bisa beralih kepada perusahaan lain.

¹³ Helmi Meylani Idrus, *Consumen Banking Realtionship Manajer "wawancara"*, pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

¹⁴ Helmi Meylani Idrus, *Consumen Banking Realtionship Manajer "wawancara"*, pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

b. Akuntabilitas Horizontal terhadap Karyawan

Pentingnya karyawan sebagai salah satu *stakeholders* cukup disadari oleh Bank Mandiri Syariah Palopo, hal ini tercermin dari informasi pengungkapan mengenai karyawan pada laporan tahunan. BSM memastikan setiap pegawainya memiliki kompetensi yang memadai dengan tuntutan kerjanya melalui penyelenggaraan berbagai diklat untuk meningkatkan *knowledge & skill* serta memperbaiki behavior masing-masing pegawai.

Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap karyawan berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan karyawan pada perusahaan. Tidak adanya transparansi informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan Bank Mandiri Syariah, tidak terciptanya komunikasi yang baik oleh perusahaan terhadap karyawan karena tidak adanya transparansi informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan Bank Mandiri Syariah Indonesia.

c. Akuntabilitas Horizontal: *Indirect Stakeholders*

Akuntabilitas horizontal disini yaitu pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas yaitu komunitas. Menurut bapak Alimuddin *Indirect Stakeholder* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan yang dimaksud disini adalah nasabah.¹⁵

Dalam akuntabilitas horizontal terhadap nasabah. Bank Syariah Mandiri Indonesia telah mengungkapkan beberapa item yang berkaitan dengan *Indirect*

¹⁵ Alimuddin, Pawning Officer “*Wawancara*” pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

Stakeholder yaitu:

1. Program pengembangan dan pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), membantu menumbuhkan dan menguatkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia melalui pemberian modal, pendampingan, pelatihan, dukungan teknologi dan lain-lain. Program pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) selama ini dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga mitra diantaranya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop). Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi.
2. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Seluruh dana yang diterima Baitulmaal Mandiri Syariah (BMM) telah disalurkan kepada masyarakat melalui program-program yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Program-program yang dibentuk oleh Baitulmaal Mandiri Syariah (BMM) difokuskan kepada 3 bagian yaitu:
 - a. Pengembangan Komunitas.
 - b. Sosialisasi Islam.
 - c. Keuangan mikro.
3. Tidak hanya bersumber dari Bank Mandiri Syariah, Baitulmaal Mandiri Syariah (BMM) juga telah menerima dana zakat, infaq, sedekah (Non ZIS), wakaf, kemanusiaan dan dana Non Zakat, Infaq, Sedekah (Non ZIS), serta dana sosial lainnya dari masyarakat dan beberapa lembaga lainnya baik di

dalam negeri maupun luar negeri. Tidak hanya kepada Baitulmaal Mandiri Syariah itu sendiri, secara tidak langsung pencapaian tersebut juga merupakan bentuk dari kontribusi Bank Mandiri Syariah sebagai pendiri Baitulmaal Mandiri Syariah untuk mensejahterahkan ekonomi masyarakat dengan prinsip syariah, peningkatan kualitas hidup dan kepedulian terhadap lingkungan yang dijalankan melalui program-program Baitulmaal Mandiri Syariah.

4. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak (misalnya tidak menggusur rakyat kecil, tidak membodohi). Secara syariah *Indirect Stakeholder* berhak mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan meskipun tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap perusahaan.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Muamalah Indonesia dapat mengurangi tensi kebencian masyarakat terhadap perusahaan. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap *indirect stakeholder* adalah hilangnya simpati dari para komunitas yang mengakibatkan turunnya citra perusahaan tersebut.

3. Akuntansi Horizontal: Alam

Akuntabilitas horizontal berikutnya adalah pada alam. Dalam akuntabilitas horizontal terhadap alam. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap alam berdasarkan *Syariah Enterprise Theory*, citra perusahaan menjadi turun dikalangan masyarakat karena rendahnya kepedulian dan perhatian perusahaan terhadap alam. Alam merupakan pihak yang

memberikan kontribusi bagi hidup matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia, dan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Wujud distribusi kesejahteraan perusahaan terhadap alam berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian, pencegahan pencemaran dan lain-lain.

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 butir 3 UU No. 40/2007).

Pesan UU tersebut jelas, bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bukan semata-mata kewajiban karena tuntutan regulasi, tetapi sebuah kesadaran yang melahirkan komitmen berkelanjutan. Setiap perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan bisnis di Indonesia sudah sepatutnya untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Bukan sebatas kegiatan artifisial guna memenuhi kelayakan operasional perusahaan, namun diusung sebagai bagian kesertaan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Perbankan Syariah khususnya bank Mandiri Syariah sebagai salah satu unsur dari perseroan di Indonesia sudah seharusnya menjadi bagian yang mengimplementasikan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Energi

penggerakan tanggung jawab sosial perusahaan di perbankan syariah seharusnya lebih kuat dan mendalam, karena perbankan syariah lahir dari pembumian pesan ilahiah. Perbankan syariah mengemban “pesan dari langit” untuk menciptakan kemakmuran (kesejahteraan) di muka bumi. Ini menegaskan bahwa sejak lahir perbankan syariah sudah memiliki muatan dimensi sosial (kemasyarakatan) di dalamnya.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Bank Mandiri Syariah dapat menggunakan dana yang berasal dari keuntungan perusahaan, zakat para karyawan dan sumbangan sosial (dari karyawan). Ketiga sumber dana ini dapat dikombinasikan sedemikian rupa dalam menciptakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih efektif.

Beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa dilakukan oleh bank Mandiri Syariah adalah : pengembangan kewirausahaan, pemberian bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro, bimbingan atau pendampingan usaha, pengembangan dan fasilitasi program dana bergulir, pembentukan jaringan kelompok usaha (sentra usaha), pembentukan wahana pemasaran bersama serta pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro syariah.

Apabila program tanggung jawab sosial perusahaan bank Mandiri Syariah berhasil dilaksanakan, maka dampaknya akan terlihat nyata. Selain bermanfaat langsung dalam perbaikan kesejahteraan bagi para penerima manfaatnya, program tanggung jawab sosial perusahaan yang berhasil akan menciptakan kerangka landasan bagi terbentuknya komunitas pengusaha mikro yang siap untuk memasuki fase komersial. Kondisi ini akan memudahkan perbankan syariah

dalam memperluas bisnisnya baik dalam menghimpun (funding) maupun mengucurkan (lending) dana.

B. Pembahasan

1. Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo

BSM meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan menjalankan praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, BSM menempatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang. Arti dari bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business*) adalah bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan satu bentuk tindakan etis perusahaan/dunia bisnis yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan alam sekitar perusahaan.

Program CSR, baik di kantor pusat maupun kantor cabang BSM, disusun berdasarkan perencanaan yang matang, yang bertanggung jawab serta terkonsep dengan mengacu pada kebijakan BSM. Berbagai program yang dimiliki BSM dilakukan secara sinergi dengan LAZNAS BSM. Sebagai strategi agar dalam menyusun rencana program CSR tepat sasaran dan tepat guna, pelaksanaan

program CSR didasarkan dari hasil survei serta pemetaan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, program yang telah disusun itu dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme *bottom up* dan melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain. Agar program dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal, maka metode pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah setempat, serta para pihak yang terlibat langsung.

Alasan perusahaan khususnya dibidang perbankan melaksanakan tanggung jawab sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggung jawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*. Sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial.

Tanggung jawab sosial merupakan praktik pelaporan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah.

Bentuk pertanggungjawaban sosial tersebut adalah diungkapkannya atau dibuatnya suatu laporan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada para *stakeholders* bahwa perusahaan memberi perhatian pada pengaruh sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan. Pengungkapan

ini bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pengaruhnya bagi masyarakat.¹⁶

Pemilihan bentuk tanggung jawab sosial di sektor perbankan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor keuangan atau *financial* seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank. Bank dengan jumlah cabang yang lebih banyak dianggap mempunyai visibilitas tinggi antar pelanggan sehingga harus lebih banyak juga melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya.

Tanggung jawab social merupakan bagian dari eksistensi sebuah bank syariah utama, Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan prinsip pertumbuhan berkelanjutan. Bank Mandiri Syariah Indonesia menerapkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Arti dari bisnis berkelanjutan adalah bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan.

Tujuan Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo melaksanakan program tanggung jawab social yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan prinsip-prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang mengedepankan kepedulian pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial dan kemanusiaan,

¹⁶ Meutia, Inten, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2011), h. 11

serta kesehatan, merupakan fokus utama dari wujud nyata pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Helmi sebagai berikut:

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang antara lain pendidikan dan pelatihan (dukungan penelitian, magang dan pelatihan. Dukungan dalam kegiatan pelayanan pada lembaga yang mengajukan proposal, majelis taklim untuk perkembangan dakwah dan dukungan tablik akbar, serta zakat). Kesejahteraan karyawan melalui pemberdayaan karyawan dan keluarganya dan kepuasan nasabah dengan informasi dan sosialisasi-sosialisasi produk terbaru serta pelayanan yang baik.”¹⁷

Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan Baitulmaal Mandiri Syariah (BMM) Cabang Palopo bersumber dari dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Bank Mandiri Syariah, karyawan dan nasabah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan dana sosial lainnya, serta dana non-halal yang diterima Bank Mandiri Syariah seperti pendapatan yang bersumber dari penempatan dana pada bank konvensional. Tidak hanya bersumber dari Bank Mandiri Syariah, Baitulmaal Mandiri Syariah (BMM) juga telah menerima dana zakat, infaq, sedekah (ZIS), wakaf, kemanusiaan, dan dana non-ZIS, serta dana sosial lainnya dari masyarakat dan beberapa lembaga lainnya baik didalam negeri maupun luar negeri.

Manfaat pelaporan tanggung jawab sosial apabila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, yaitu dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, manfaat itu meliputi:

¹⁷Helmi Meylani Idrus, *Consumen Banking Realtionship Manajer “wawancara”*, pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

1) Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab secara sosial.

2) Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan.

3) Menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik.

4) Kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah go public, menjadi lebih baik.¹⁸

Sementara itu manfaat eksternal yang dapat diperoleh perusahaan dari penerapan pelaporan tanggung jawab sosial sebagai berikut:

1) Penerapan tanggung jawab sosial akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggungjawaban secara sosial.

2) Pelaporan tanggung jawab sosial merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.

Melaksanakan pelaporan tanggung jawab sosial dan membuka kegiatan pelaporan tanggung jawab sosial secara public merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan khalayak.

¹⁸ Mursitama, Tirta, dkk, *Corporate Social Responsibility di Indonesia (Teori dan Implementasi)*, h. 27

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo

BSM memandang bahwa distribusi manfaat ekonomi (*economic performance*) yang diperoleh perusahaan tidak hanya sebatas pada kontribusi perusahaan atas laba, yang selanjutnya dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Akan tetapi, BSM juga memandang pentingnya distribusi ekonomi dalam bentuk manfaat kepada para pegawai perusahaan dan stakeholders yang lain. Selain itu, kontribusi ekonomi perusahaan juga terlihat nyata dari berbagai pembayaran kepada para pemasok barang/jasa, sumbangan-sumbangan serta bantuan kemasyarakatan lainnya.

Dalam bidang sosial (*social performance*), BSM menaruh perhatian besar pada aspek tenaga kerja (*labour*) termasuk di dalamnya aspek hak-hak berserikat, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pendidikan dan latihan, serta pengembangan jenjang karir mereka. Dalam bidang ini, perusahaan selalu beroperasi dalam koridor penghormatan pada hak asasi manusia (*human rights*) dengan selalu memberikan perlakuan setara kepada semua suku, agama, ras yang berbeda (*non discrimination*), tidak mempekerjakan tenaga kerja anak (*child labour*) dan tenaga kerja paksa (*forced and compulsory labour*), serta selalu memadukan keharmonisan dengan masyarakat sekitar dan mematuhi peraturan yang berlaku (*society*).

Dalam bidang lingkungan (*environmental performance*), BSM sepenuhnya peduli pada penggunaan material, energi langsung dan tidak langsung, air, serta kadar emisi dan limbah. Perusahaan semaksimal mungkin menghindari operasi yang memberikan dampak negative terhadap lingkungan.

Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial di bank Syariah Mandiri karena bank Syariah Mandiri berdasar kepada teori Syariah *Enterprise Theory* (SET). Meutia menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial, dalam hal ini bank syariah, adalah syariah *enterprise theory* (SET). Hal ini karena dalam syariah *enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

a. Akuntabilitas vertikal: Allah swt

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Alimuddin mengatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban kepada Tuhan yang dapat dianggap sebagai upaya bank untuk memenuhi prinsip syariah antara lain dapat dilihat melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan merupakan salah satu kepatuhan bank terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DS)”¹⁹

Meskipun sebenarnya opini ini lebih pada menjelaskan kepatuhan bank terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol untuk memonitor kinerja bank Islam yang berkaitan dengan isu kepatuhan pada syariah. Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dimaksudkan untuk memastikan semua kontrak, prosedur dan transaksi yang dilakukan oleh bank Islam adalah sesuai dengan aturan Islam.

¹⁹ Alimuddin, Pawning Officer “*Wawancara*” pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

b. Akuntabilitas horizontal: *Direct Stakeholder*

1) Akuntabilitas Horizontal terhadap Nasabah

Pelaksanaan tanggung jawab sosial akan meningkatkan respon terhadap keinginan masyarakat untuk memilih perusahaan tersebut sehingga dapat menguntungkan perusahaan. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap nasabah adalah mengurangi citra perusahaan dimata para nasabah sehingga nasabah bisa beralih kepada perusahaan lain.

2) Akuntabilitas Horizontal terhadap Karyawan

Pentingnya karyawan sebagai salah satu *stakeholders* cukup disadari oleh Bank Mandiri Syariah Palopo, hal ini tercermin dari informasi pengungkapan mengenai karyawan pada laporan tahunan. BSM memastikan setiap pegawainya memiliki kompetensi yang memadai dengan tuntutan kerjanya melalui penyelenggaraan berbagai diklat untuk meningkatkan *knowledge & skill* serta memperbaiki behavior masing-masing pegawai.

Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap karyawan berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan karyawan pada perusahaan. Tidak adanya transparansi informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri Indonesia (BMI), tidak terciptanya komunikasi yang baik oleh perusahaan terhadap karyawan karena tidak adanya transparansi informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan Bank Mandiri Syariah Indonesia.

3) Akuntabilitas Horizontal: *Indirect Stakeholders*

Akuntabilitas horizontal disini yaitu pertanggungjawaban terhadap

masyarakat luas yaitu komunitas. Menurut bapak Alimuddin *Indirect Stakeholder* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan yang dimaksud disini adalah nasabah.²⁰

Pelaksanaan tanggung jawab sosial pada Bank Syariah Mandiri Palopo dapat mengurangi tensi kebencian masyarakat terhadap perusahaan. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap *indirect stakeholder* adalah hilangnya simpati dari para komunitas yang mengakibatkan turunnya citra perusahaan tersebut.

c. Akuntansi Horizontal: Alam

Akuntabilitas horizontal berikutnya adalah pada alam. Dalam akuntabilitas horizontal terhadap alam. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap alam berdasarkan *Syariah Enterprise Theory*, citra perusahaan menjadi turun dikalangan masyarakat karena rendahnya kepedulian dan perhatian perusahaan terhadap alam. Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi hidup matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia, dan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Wujud distribusi kesejahteraan perusahaan terhadap alam berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian, pencegahan pencemaran dan lain-lain.

²⁰ Alimuddin, Pawning Officer “*Wawancara*” pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

3. Kendala yang Dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BSM meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan menjalankan praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, BSM menempatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang. Arti dari bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business*) adalah bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan.

BSM memandang bahwa distribusi manfaat ekonomi (*economic performance*) yang diperoleh perusahaan tidak hanya sebatas pada kontribusi perusahaan atas laba, yang selanjutnya dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Akan tetapi, BSM juga memandang pentingnya distribusi ekonomi dalam bentuk manfaat kepada para pegawai perusahaan dan stakeholders yang lain. Selain itu, kontribusi ekonomi perusahaan juga terlihat nyata dari berbagai pembayaran kepada para pemasok barang/jasa, sumbangan-sumbangan serta bantuan kemasyarakatan lainnya.

Dalam bidang sosial, BSM menaruh perhatian besar pada aspek tenaga kerja termasuk di dalamnya aspek hak-hak berserikat, kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan dan latihan, serta pengembangan jenjang karir mereka. Dalam bidang ini, perusahaan selalu beroperasi dalam koridor penghormatan pada hak asasi manusia dengan selalu memberikan perlakuan setara kepada semua suku,

agama, ras yang berbeda, tidak mempekerjakan tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa, serta selalu memadukan keharmonisan dengan masyarakat sekitar dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam bidang lingkungan, BSM sepenuhnya peduli pada penggunaan material, energi langsung dan tidak langsung, air, serta kadar emisi dan limbah. Perusahaan semaksimal mungkin menghindari operasi yang memberikan dampak negative terhadap lingkungan.

Mengingat pentingnya investasi sosial ini, BSM menunjukkan komitmen bagi tercapainya misi perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan berbagai program strategis terkait, dengan tujuan:

- a. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.
- b. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing, serta mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui pengelolaan yang profesional.
- c. Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, yang berpotensi memberi hubungan timbal balik jangka panjang dengan bisnis Perseroan melalui penyaluran dana kemitraan dan pembinaan berkesinambungan, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
- d. Partisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan strategis pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, BSM senantiasa mengembangkan program dengan mempertimbangkan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan berlanjutnya manfaat pelaksanaan program bagi tumbuh dan berkembangnya kemandirian komunitas sekitar.

Sebagian besar perusahaan menggunakan CSR hanya sebagai *marketing gimmick* untuk melakukan *corporate greenwash* atau pengelabuan citra perusahaan belaka. Bagi perusahaan-perusahaan yang berkehendak untuk melaksanakan CSR dengan sungguh-sungguh. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan CSR di Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan GCG “*Good Corporate Governance*” yang ditemukan diantaranya permasalahan transparansi perusahaan dalam mengelola dan memberikan *cost* sosialnya kepada masyarakat. Tidak adanya aturan-aturan yang mengatur secara terperinci bagaimana pengelolaan CSR. Ada bentuk penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya, jika dilihat pada program-program bantuan bencana alam, banyak perusahaan khususnya media elektronik yang membuka rekening bantuan untuk menghimpun dana dari masyarakat namun dalam pemberian bantuan mereka mengatas namakan perusahaan mereka, ini merupakan suatu bentuk penipuan bagi masyarakat.

Selain itu pelaksanaan CSR di Bank Syariah Mandiri menimbulkan berbagai permasalahan baik itu dari masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang datang dari masyarakat, kadang kala masyarakat belum siap untuk diajak mengimplementasikan CSR terutama bila sifatnya partisipatif, dimana masyarakat

tidak mau diajak berubah hanya ingin mendapatkan bantuan saja berupa kucuran dana (filantropi) serta cultur dan terkadang capacity building ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan.

Dalam pelaksanaan CSR tentu mengalami hambatan menurut Helmi hambatan tersebut adalah faktor kepercayaan, dimana masih adanya anggapan bahwa pelaksanaan tanggungjawab sosial hanya sebatas kepatuhan saja dan upaya yang dilakukan Bank syariah Mandiri Cabang Palopo untuk mengatasi kendala itu dengan cara adanya pembuktian dengan transparan.²¹

Sebagian masyarakat mengatakan bahwa permasalahan yang lain dirasakan dalam pelaksanaan CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo adalah perusahaan yang melakukan CSR hanya untuk kampanye PR (*Public Relation*), tidak adanya ketulusan perusahaan untuk membuat program CSR yang berkelanjutan (secara *continue*) dan memonitor, mengevaluasi dan membuat laporan secara sistemeatis untuk berkomunikasi dengan stakeholder untuk mengukur kinerja CSR yang mereka lakukan.

²¹ Helmi Meylani Idrus, *Consumen Banking Realtionship Manajer "wawancara"*, pada tanggal 13 Maret 2017 di Palopo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial di Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo berupa pendidikan dan pelatihan (dukungan penelitian, magang dan pelatihan). Dukungan dalam kegiatan pelayanan pada lembaga yang mengajukan proposal, majelis taklim untuk perkembangan dakwah dan dukungan tablik akbar, serta zakat). Mendukung kesejahteraan karyawan melalui pemberdayaan karyawan dan keluarganya dan kepuasan nasabah dengan informasi dan sosialisasi-sosialisasi produk terbaru serta pelayanan yang baik. Kegiatan tersebut bersumber dari zakat, infaq dan sedekah yang besumber dari karyawan, nasabah, dana kegiatan dan dana sosial lainnya.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial di Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo adalah (1) bentuk pertanggung jawaban bank Mandiri Syariah terhadap Allah swt yang dapat dianggap sebagai upaya bank untuk memenuhi prinsip syariah antara lain dapat dilihat melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan merupakan salah satu kepatuhan bank terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DS), (2) pertanggungjawaban terhadap *Stakeholders* (nasabah) sebagai respon terhadap keinginan masyarakat untuk memilih perusahaan tersebut sehingga dapat menguntungkan perusahaan, (3) pertanggungjawaban terhadap karyawan dilakukan untuk menghindari ketidakpercayaan karyawan pada perusahaan dan (4) pertanggung jawaban ke masyarakat luas hal ini dilakukan untuk mengurangi tensi kebencian masyarakat terhadap perusahaan.

3. Kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo pada Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah faktor kepercayaan, dimana masih adanya anggapan bahwa pelaksanaan tanggungjawab sosial hanya sebatas kepatuhan saja dan upaya yang dilakukan Bank syariah Mandiri Cabang Palopo untuk mengatasi kendala itu dengan cara adanya pembuktian dengan transparan

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi kalangan praktisi
 - a. Penulis menyarankan agar Bank Syariah Mandiri lebih memperhatikan isu lingkungan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial. Karena dalam Islam sendiri telah dijelaskan dalam ayat-ayat Allah SWT tentang perintah untuk menjaga dan menyelamatkan lingkungan.
 - b. Penulis menyarankan agar Bank Syariah Mandiri dapat menciptakan keseimbangan informasi guna meningkatkan kesejahteraan seluruh *stakeholders*. Keseimbangan informasi tersebut dapat dilakukan dengan mengaplikasikan konsep Syariah *Enterprise Theory* (SET) untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial sekaligus melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih mempunyai keterbatasan. Jumlah bank yang diteliti hanya satu bank syariah sehingga terbatas dalam generalisasi hasil penelitian. Penulis mengharapkan, untuk penelitian selanjutnya jumlah objek penelitian diperbanyak sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian lebih menggambarkan keadaan sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta:Rajawali Press,2008.
- Febrianti, Diah 2011. *Good Corvorate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada PT. Bank X, Tbk)*. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. Bogor.
- Hadi, Amirul dan Haryianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan untuk IAIN dan PTAIN semua jurusan komponen MKK*,Bandung : Pustaka Setia, 1998.
- Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001.
- Kartini, Dw, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2009.
- Meutia, Inten, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2011.
- Moloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat.Muhammad, 2005
- Mursitama, Tirta, dkk, *Corporate Social Responsibility di Indonesia (Teori dan Implementasi)*, (Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), 2011.
- Putra, Aditya Prayanto. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur)*,Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Solihin, Ismail, *Corporate SocialResponsibility (CSR)*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sukmadinata, Nana Syaodah. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2009.

Triyuwono, Iwan. *Mengangkat "sing liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah*. (Simposium Nasional Akuntansi X Unhas, 26-28 Juli 2007).

Untung, Hendrik B. *Corporate Social responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yusuf, yasir. *Aplikasi CSR pada bank syariah: suatu pendekatan masalah dan Maqasid syariah*, (EKSIBISI, Vol 4, No 2, juni 2010).



Dokumentasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Bank Syariah Mandiri

